

---

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUMEDANG

**Mahesa Dwi Putra**  
Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

---

### Keywords:

Policy Implementation  
SRIKANDI Application  
Archival Digitalization  
Dynamic Records Management  
Archives and Library Office

---

## ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System Application (SRIKANDI) policy at the Department of Archives and Library of Sumedang Regency, identify the obstacles faced, and explore efforts made to overcome them. A qualitative method was used, with data collected through literature studies and field research, including in-depth interviews, observations, and documentation. Informants included the head of the department, head of the archival division, archival functionaries, and technical staff operating the SRIKANDI application. The findings indicate that SRIKANDI implementation has generally progressed well in supporting digital archiving. However, challenges remain, such as limited IT infrastructure, lack of comprehensive staff training, and resistance to shifting from manual to digital systems. Integration with the previous archiving system is also suboptimal, causing overlapping workflows. To address these challenges, the department has improved human resource capacity through training, provided necessary infrastructure, and conducted continuous outreach to promote understanding and commitment to digital transformation. The study recommends increasing budget allocation for IT infrastructure, providing equitable training for all staff, developing standard operating procedures (SOPs), and strengthening interdepartmental coordination to ensure more effective and sustainable implementation of the SRIKANDI application.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Mahesa Dwi Putra.  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.  
Universitas Sebelas April.  
Jl. Angkrek Situ No. 19 Kelurahan Situ- Sumedang.  
Email: [mahesadwi26@gmail.com](mailto:mahesadwi26@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Arsip memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Sebagai catatan administratif, arsip menjadi bukti historis yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam lingkup pemerintahan, arsip berperan dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi kebijakan yang telah ditetapkan. Keberadaan arsip yang tertata dengan baik memungkinkan informasi terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan. Schellenberg (1956) mengklasifikasikan arsip menjadi arsip dinamis yang masih aktif digunakan dan arsip statis yang telah melewati masa guna administrasinya tetapi tetap bernilai sebagai sumber sejarah. Pengelolaan arsip yang tidak optimal dapat menghambat kinerja organisasi serta menyebabkan hilangnya informasi penting yang berpotensi menghambat proses administrasi pemerintahan.

Dalam rangka mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan arsip, pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Kebijakan ini menuntut seluruh instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam administrasi dan tata kelola dokumen. Implementasi SPBE diharapkan mampu mengintegrasikan sistem pengelolaan arsip secara nasional sehingga memudahkan akses dan pertukaran informasi antarinstansi. Melalui sistem ini, birokrasi dapat berjalan lebih efisien karena arsip terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dalam waktu singkat (Peraturan Presiden, 2018).

Sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi arsip, ANRI mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang memungkinkan pengelolaan dokumen secara elektronik. Aplikasi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah dalam menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan arsip secara lebih sistematis dan aman. Dengan menggunakan SRIKANDI, instansi pemerintahan dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik serta meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengolahan arsip. Sistem ini juga mendukung konsep pemerintahan berbasis data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Arsip Nasional RI, 2021). Keberadaan aplikasi SRIKANDI memberikan berbagai manfaat dalam proses pengelolaan arsip, terutama dalam mendukung prinsip *paperless office*. Arsip yang terdokumentasi dalam format digital lebih mudah diakses dan dikelola tanpa perlu menggunakan media kertas yang rentan terhadap kerusakan fisik. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengaturan hak akses yang lebih baik sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membuka atau mengedit dokumen tertentu. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat (Purnomo & Haryanto, 2021).

Namun, meskipun digitalisasi menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya bukan tanpa tantangan. Banyak instansi pemerintah masih mengalami kendala dalam adopsi sistem digital, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan. Studi yang dilakukan oleh Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi arsip sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai serta peningkatan kapasitas pegawai dalam mengoperasikan sistem digital. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pengelolaan arsip memerlukan strategi yang matang agar dapat berjalan dengan optimal.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang telah mengadopsi aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola arsip pemerintahan. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan dokumen daerah. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam memastikan sistem ini dapat berfungsi secara optimal. Dengan digitalisasi arsip, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen serta mempercepat proses pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kearsipan (Peraturan Bupati Sumedang, 2023).

Selain faktor teknis, sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem digital menjadi tantangan tersendiri. Banyak pegawai pemerintahan masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SRIKANDI karena minimnya pelatihan yang diberikan. Kurangnya pemahaman terhadap sistem ini menyebabkan proses digitalisasi arsip berjalan lebih lambat dari yang diharapkan (Susanto, 2022). Resistensi terhadap perubahan juga menjadi faktor yang menghambat penerapan sistem ini secara optimal. Kebiasaan menggunakan metode manual dalam pengelolaan arsip membuat sebagian pegawai enggan beralih ke sistem digital. Adaptasi terhadap perubahan memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar pegawai dapat memahami manfaat dan urgensi dari digitalisasi arsip (Prasetyo, 2023).

Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi tantangan dalam implementasi sistem digitalisasi arsip. Regulasi yang belum sepenuhnya terharmonisasi menyebabkan adanya perbedaan dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara ANRI dan pemerintah daerah agar regulasi dapat diterapkan secara konsisten (Siregar, 2022).

Beberapa daerah lain di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan sistem SRIKANDI. Namun, kesuksesan implementasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Dengan adanya perbedaan kondisi di setiap

daerah, strategi implementasi perlu disesuaikan agar sistem ini dapat berjalan secara efektif (Purnomo & Haryanto, 2021). Minimnya penelitian mengenai implementasi SRIKANDI di tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut hambatan serta solusi yang dapat diterapkan. Dengan melakukan analisis lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih tepat guna dalam mempercepat digitalisasi arsip di daerah (Wahyudi, 2022). Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran guna memperbaiki infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem ini. Peningkatan jaringan internet serta perangkat keras yang lebih modern menjadi kebutuhan utama agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal (Siregar, 2022). Namun, implementasi SRIKANDI di Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek infrastruktur teknologi informasi. Keterbatasan jaringan internet serta perangkat keras yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam pengoperasian sistem ini. Stabilitas jaringan sangat berpengaruh terhadap kelancaran akses dokumen digital, sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem berbasis elektronik ini (Widodo, 2021).

Tidak hanya dari sisi pegawai, tantangan lain dalam implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan aspek regulasi dan koordinasi antarinstansi. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi hambatan dalam penerapan sistem berbasis digital seperti SRIKANDI. Beberapa regulasi yang mengatur tentang kearsipan dan digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pegawai dalam menjalankan kebijakan, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses implementasi secara keseluruhan. Pelatihan bagi pegawai pemerintahan perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap dalam menggunakan sistem digital. Program literasi digital akan membantu pegawai beradaptasi lebih cepat dengan teknologi yang diterapkan (Widodo, 2021). Dengan pendekatan yang komprehensif, penerapan SRIKANDI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah serta mempercepat transformasi digital di sektor publik (Purnomo & Haryanto, 2021). Peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem digitalisasi arsip. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas jaringan internet, memperbarui perangkat keras yang digunakan dalam operasional aplikasi, serta memastikan adanya sistem keamanan data yang dapat melindungi arsip digital dari ancaman kebocoran atau peretasan.

Di Kabupaten Sumedang, permasalahan pengelolaan arsip masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal keterlaksanaan kebijakan kearsipan di tingkat perangkat daerah. Berdasarkan identifikasi hasil observasi diawal penelitian, terdapat beberapa indikasi masalah di antaranya adalah:

1. Kurangnya pendanaan yang cukup sehingga terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, di beberapa perangkat daerah di Kabupaten Sumedang, infrastruktur teknologi informasi belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidakstabilan jaringan internet yang menghambat kelancaran penerapan sistem SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis.
2. Belum adanya SOP yang jelas dalam pelatihan dan pengembangan staf, terdapat kesenjangan dalam sosialisasi dan pendampingan teknis, di mana dari 21 arsiparis, hanya 10 orang yang telah mengikuti diklat khusus untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan data yang terlampir. Kondisi ini mencerminkan ketidaksamarataan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan.
3. Kurangnya komunikasi dan penyampaian informasi yang jelas dalam integrasi dengan sistem kearsipan yang sudah ada, sebelum implementasi SRIKANDI, Dinas Arsip telah menggunakan aplikasi serupa, yaitu Sistem Manajemen Kearsipan (SIMAPAN), yang difungsikan hanya dalam pengelolaan arsip dinamis pada tahap penciptaan dan penggunaan. Sementara itu, aplikasi SRIKANDI memiliki cakupan yang lebih luas yakni seluruh pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pemusnahan. Namun, dalam proses integrasi antar sistem tersebut, kurangnya komitmen dari sebagian aparatur dalam penyampaian informasi terbuka serta tidak optimalnya kedisiplinan dalam mengikuti alur perubahan sistem menyebabkan terjadinya kebingungan dan tumpang tindih fungsi antar aplikasi. Disamping itu, kurangnya kejujuran dalam pelaporan dan dokumentasi perkembangan implementasi turut memperlambat proses adaptasi dan pengambilan Keputusan yang akurat terkait integrasi sistem kearsipan ini.

## 2. METHOD

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Sahir, 2021:1).

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Lexy J. Moleong (2007:157), subjek penelitian dalam penelitian kualitatif tidak hanya mengacu pada individu atau kelompok, tetapi juga bisa mencakup berbagai unit sosial atau organisasi yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Pemilihan subjek yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, karena mereka akan memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan isu yang diteliti. Moleong juga menyarankan agar peneliti memilih subjek yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai topik yang diteliti agar data yang diperoleh lebih valid dan menggambarkan kenyataan di lapangan dengan baik.

Untuk menunjang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Selanjutnya prosedur pengolahan data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Edward III (Marwiyah, 2022:47-49), yaitu sebagai berikut:

### 3.1. Struktur Birokrasi

Pada dimensi komunikasi menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, dimensi kewenangan dan struktur birokrasi menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Secara kelembagaan, struktur organisasi telah menunjukkan konfigurasi yang cukup baik, dengan pembagian tugas yang jelas antar unit kerja. Ketersediaan struktur ini memberikan dasar yang kuat bagi proses koordinasi internal dalam mendukung kegiatan alih media arsip. Tata kerja yang tertata ini memungkinkan proses pengelolaan arsip berbasis digital dapat dijalankan secara terkoordinasi, meskipun masih dalam tahap transisi menuju sistem yang sepenuhnya digital.

Namun, di balik kekuatan tersebut, tantangan tetap ada, terutama dalam hal ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait implementasi aplikasi SRIKANDI. SOP yang menjadi acuan teknis bagi para pegawai dalam menjalankan proses alih media arsip belum sepenuhnya selesai disusun. Hal ini menyebabkan adanya potensi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan, terutama ketika pegawai harus mengambil keputusan teknis yang belum memiliki pedoman formal. Situasi ini juga berisiko menimbulkan ketimpangan antara unit kerja yang lebih siap secara teknis dengan yang belum memahami secara menyeluruh prosedur alih media arsip.

Di tengah proses penyusunan SOP yang masih berlangsung, dibutuhkan fleksibilitas struktural agar organisasi tetap dapat bergerak, sekaligus adaptabilitas dalam menerima masukan dari instansi pusat seperti ANRI. Seperti yang diungkapkan Peters (2015), struktur organisasi birokrasi yang ideal bukan hanya jelas dalam pembagian tugas, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi perubahan. Di Indonesia, Dwiyanto (2018) menambahkan bahwa organisasi publik harus mampu bergerak secara lincah tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui SOP yang dinamis dan sesuai konteks lokal merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik pelaksanaannya.

### 3.2. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI memegang peranan penting sejak awal diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022. Upaya komunikasi yang dilakukan tergolong aktif dan intensif, terutama pada tahun-tahun awal seperti 2023. Sosialisasi langsung kepada para arsiparis, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), webinar kearsipan, hingga forum pembinaan, menjadi langkah konkret untuk membangun pemahaman bersama antarunit terkait. Tujuannya adalah

memastikan bahwa kebijakan digitalisasi arsip tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga mampu diterjemahkan ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Namun, dinamika implementasi menunjukkan bahwa intensitas komunikasi mengalami penurunan. Jika sebelumnya sosialisasi dilakukan secara rutin dan terstruktur, kini kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun, lebih sebagai pemenuhan kebutuhan administratif (eviden) daripada sebagai upaya transformasi pengetahuan. Padahal, komunikasi kebijakan idealnya bersifat berkelanjutan, adaptif, dan partisipatif. Tanpa pembaruan komunikasi yang teratur, risiko terjadinya miskomunikasi atau pemahaman yang tidak utuh akan meningkat, khususnya bagi pegawai baru yang belum mendapatkan pelatihan langsung.

Ketiadaan forum komunikasi rutin juga berimplikasi pada lemahnya umpan balik dari pelaksana kebijakan ke level pimpinan. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan stagnasi dalam inovasi kebijakan dan ketidakcocokan antara desain kebijakan dan kebutuhan aktual di lapangan. Kincaid (dalam Nurlala et al., 2024) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan partisipasi aktif dari semua pihak. Riant Nugroho (2020) menambahkan bahwa tanpa komunikasi yang terencana dan sistemik, maka kebijakan cenderung gagal mengakar, apalagi dalam konteks birokrasi yang terus mengalami perputaran pegawai.

### **3.3. Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi aplikasi SRIKANDI sangat bergantung pada ketersediaan dan kecukupan sumber daya, baik berupa anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, keterbatasan pendanaan menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan kebijakan. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan operasional, seperti pembelian perangkat teknologi informasi, pengembangan sistem pendukung, serta pelatihan teknis bagi pegawai. Imbasnya, kegiatan pelatihan menjadi terbatas, perangkat yang digunakan tidak merata antar unit, dan keberlanjutan sistem terganggu karena tidak semua proses digitalisasi berjalan serempak.

Sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial yang masih menghadapi kendala. Jumlah pegawai yang menguasai sistem informasi kearsipan modern masih sangat terbatas. Bahkan, beberapa pegawai yang ditugaskan belum memiliki latar belakang teknis yang memadai dalam bidang teknologi informasi maupun manajemen arsip digital. Kurangnya pelatihan lanjutan dan pembinaan teknis menyebabkan ketergantungan pada staf tertentu saja, sehingga proses menjadi lambat dan berisiko jika personel kunci tersebut tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana perlu ditingkatkan secara menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan kompetensi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya yang tidak memadai, baik dalam jumlah maupun kualitas, merupakan penghambat utama keberhasilan kebijakan publik. Suwondo (2016) juga menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan digital yang terhambat bukan karena desainnya buruk, tetapi karena pelaksananya tidak disiapkan secara serius melalui pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Maka dari itu, alokasi anggaran dan strategi pengembangan SDM harus menjadi perhatian utama jika aplikasi SRIKANDI ingin berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### **3.4. Disposisi**

Disposisi merupakan dimensi yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan. Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup tinggi terhadap kebijakan aplikasi SRIKANDI. Meskipun menghadapi keterbatasan sarana, mereka tetap menunjukkan semangat untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem digital. Inisiatif pribadi dalam memahami aplikasi, diskusi informal antarpegawai, serta partisipasi aktif dalam pelatihan adalah indikator adanya keinginan kuat dari pelaksana untuk mendukung kebijakan yang berlaku.

Disiplin juga menjadi aspek yang mencolok, terutama dalam pengelolaan arsip elektronik. Pegawai menjalankan tugas sesuai dengan waktu dan prosedur yang ditetapkan, menunjukkan bahwa transformasi digital telah mulai menjadi bagian dari budaya kerja baru. Selain itu, nilai kejujuran tetap dijaga dalam proses penginputan dan pengelolaan arsip, yang penting dalam menjamin integritas sistem informasi kearsipan. Kepercayaan terhadap sistem tidak hanya dilandasi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh sikap etis dari pelaksananya.

Elmore (1979) menyatakan bahwa disposisi pelaksana menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan sesuai harapan pembuat kebijakan. Lipsky (2010) menambahkan bahwa pelaksana di tingkat akar rumput sering kali membuat keputusan mikro yang justru menentukan arah kebijakan secara riil. Dalam konteks Indonesia, Widodo (2020) menekankan bahwa tanpa perubahan sikap dan mentalitas birokrat, maka

modernisasi birokrasi tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal, meskipun sistem dan perangkat telah tersedia.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini didukung oleh struktur birokrasi dan dasar hukum yang jelas, serta adanya komitmen dari pihak pelaksana. Beberapa perangkat daerah telah mulai menggunakan aplikasi ini dalam pengelolaan arsip dinamis. Sosialisasi mengenai kebijakan sudah dilakukan, meskipun intensitas dan jangkauannya masih terbatas. Di sisi lain, sumber daya manusia yang tersedia belum seluruhnya memiliki kompetensi digital yang memadai, dan masih terdapat resistensi dari sebagian pegawai terhadap penggunaan teknologi baru. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini telah dibentuk, namun integrasi sistem antara SRIKANDI dan aplikasi sebelumnya seperti SIMAPAN masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

#### REFERENCES

- Marwiyah, S. (2022). *Administrasi Publik dan Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis, Manajemen*. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Prasetyo, B. (2023). Digitalisasi Arsip dalam Pemerintahan: Evaluasi Implementasi SRIKANDI. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 120–135.
- Purnomo, M. H., & Haryanto, A. (2021). Implementasi SRIKANDI dalam Tata Kelola Arsip Pemerintahan. *Jurnal Kearsipan Digital*, 3(2), 50–60.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA.
- Siregar, F. (2022). Infrastruktur dan Implementasi SPBE di Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 7(1), 25–40.
- Soekanto, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Wahyudi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Kearsipan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55–70.
- Widodo, A. (2021). Infrastruktur TI dan SPBE. *Jurnal Manajemen Informasi*, 9(2), 77–84.
- Widodo, J. (2020). *Manajemen Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan*. Bayumedia.
- Widodo, P. (2021). Kompetensi Digital ASN. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 99–115.